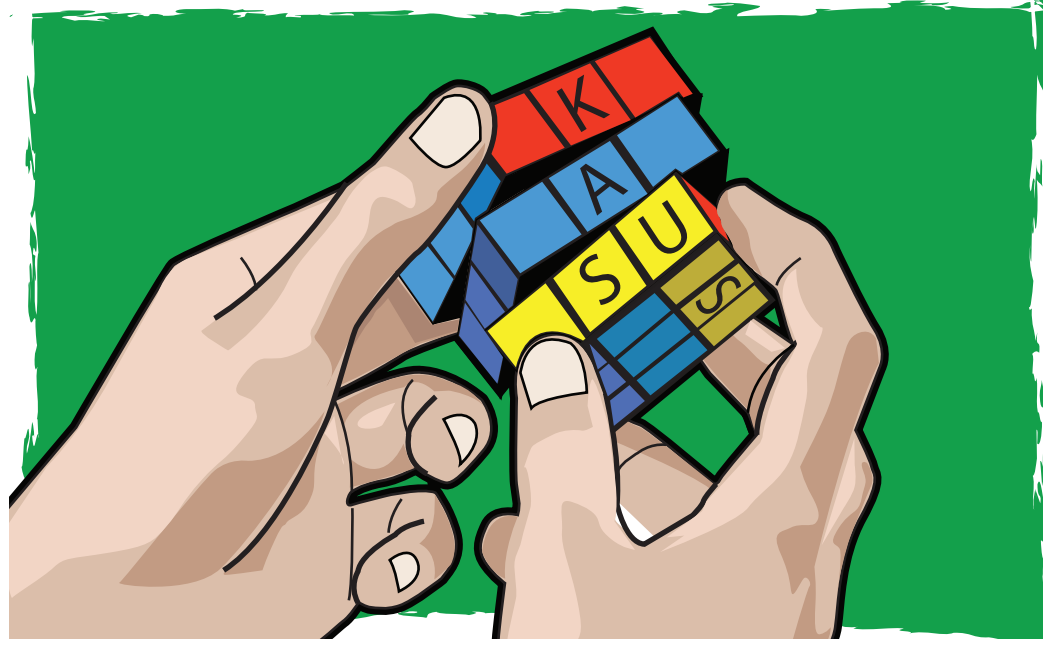


BEDAH EDITORIAL

JUMAT, 19 NOVEMBER 2010 - MEDIA INDONESIA



Bukan Intervensi tapi Campur Tangan

RAPAT kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/11), menarik dan patut dicermati. Menarik karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti dua soal saat membuka rapat.

Pertama, soal Gayus Tambunan yang bebas keluyuran ke Bali, padahal terdakwa kasus mafia pajak itu mendekam di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Kedua, Presiden mengomentari vonis M Misbakhun, anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Baik Presiden maupun Menko Polkam Djoko Suyanto yang menjelaskan hasil rapat kepada wartawan berkali-kali menegaskan tak ingin mengintervensi dua kasus tersebut.

Perihal tidak mau mengintervensi itu perlu diberi catatan dan garis tebal. Kekuasaan negara memang harus diatur dan dibatasi. Kalau tidak, cenderung mengarah ke otoriterisme, bahkan totaliterisme. Itulah sebabnya hampir semua negara demokrasi menerapkan konsep trias politika, yaitu mendistribusikan kekuasaan kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tiga lembaga itu tidak bisa saling intervensi apalagi meniadakan satu sama lain.

Akan tetapi, selalu muncul syahwat kekuasaan untuk campur tangan oleh satu lembaga terhadap lembaga lainnya. Pertanyaannya, apakah termasuk intervensi, bila Presiden mengambil tindakan terhadap kasus Gayus pelesiran ke Bali? Harus tegas dijawab adalah kewajiban Presiden untuk mengintervensinya.

Presiden mengomentari vonis pengadilan Misbakhun jelas campur tangan. Tapi, Presiden bertindak atas kasus pelesirannya Gayus bukan intervensi. Itu bahkan kewajiban!

Rendahnya Moral Pejabat

KASUS Gayus Tambunan menunjukkan pejabat-pejabat yang terlibat sudah mati hati nuraninya terhadap kesulitan sebagian besar rakyat kecil.

6281339137xxx

KAMI sebagai rakyat Indonesia meminta dengan hormat kepada Bapak SBY agar penjaga rutan dipecah semuanya.

6282153229xxx

KALAU Gayus tidak dihukum mati dan dimiskinkan, Adnan Buyung Nasution adalah pihak yang bertanggung jawab.

6281254584xxx

DALAM kasus ini, mereka yang terlibat Gayus tidak punya harga diri, bisa dibeli dengan uang.

6281338439xxx

TIDAK usah berpolemik lagi tentang pejabat yang semuanya bobrok, yang diperlukan hanya satu, yaitu bongkar semua.

628123804xxx

APAKAH tindakan SBY telah dianggap berambisi besar dan justru merugikan masyarakat?

6285213789xxx

BUKTIKAN, kalau penegak hukum bisa adil!

6285750868xxx

GAYUS harus dimiskinkan dan dihukum berat agar bangsa kita bisa maju. Aparat hukum harus dihukum berat karena mereka semua tahu hukum. Seharusnya jadi teladan bukan sebaliknya.

6285654671xxx

HUKUM yang tegas akan mewujudkan negara yang maju.

6281347308xxx

GAYUS telah membuka mata kita bahwa betapa rendahnya moral pejabat. Semua bisa dibeli dengan uang.

6285298740xxx

KORUPSI adalah penjahat negara, lebih kejam daripada teroris. Semuanya harus dibasmi di negara kita ini. Hukuman yang pantas adalah hukum gantung!

6285240812xxx

OKNUM polisi sama dengan maling periksa maling.

6281245130xxx

Kelirumologi

PRESIDEN terlalu berlindung di bawah konsep *trias politica*. Saya pikir, dalam konsep tata negara, *trias politica* tidak bisa diartikan terlalu luas. Hingga, kekuasaan penegakan hukum pada tatanan penyidikan/investigasi yang notabene dilakukan pejabat-pejabat yang diangkat dengan hak prerogatif Presiden (kepolisian dan kejaksaan). Presiden juga harus bertanggung jawab atas kinerja buruk di kedua jajaran ini, jika ada indikasi kuat memburuknya kinerja kedua lembaga di atas.

Akim

Negara tanpa Pemimpin

AMBURADULNYA pemerintahan SBY ini menunjukkan bahwa rakyat telah salah memberikan hak pilihnya kepada orang yang bukan ahlinya. Akibatnya, anak ingusan seperti Gayus saja ternyata mampu menunjukkan kepada kita semua tentang ketidakbucusan pemerintahan SBY dalam memberantas korupsi yang sudah menjadi bahaya laten di negeri ini.

Judi S Rahario

Penyelenggara Negara

MEMANG ya, sepertinya penyelenggara negara ini sudah tidak ingin lagi menegakkan kebenaran itu. Wajar kalau penanganan bencana dan ribuan pengungsi di negara ini amburadul. Karena, menangani seorang Gayus saja tidak selesai-selesai.

Gen

Gayus dan Misbakhun

DUA yang sangat beda. Gayus yang suatu saat semakin telanjang di depan mata, jelas koruptornya, hukum harus ditegakkan. Misbakhun penuh dengan intrik-intrik politik. *Ending* yang sangat lucu, boleh juga jadi tontonan lebih seru dari Century. Nah lo, kita tunggu.

Wawin

Sang Pemimpin!

APA pun yang terjadi, tetap sang pemimpin yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, Presiden harus mencampuri kasus ini, bukan nilai vonisnya, tetapi kebenaran dan kejujuran harus dikawal oleh Presiden, agar putusan keadilan terjadi!!!

Poerbo

FORUM

Cegah Investor Asing Keluar dari RI

BELAKANGAN ini para investor asing berniat menarik modalnya di Indonesia karena ada beberapa hal yang membuat mereka melakukan itu.

Artinya banyak dana asing yang akan keluar dari Indonesia. Bila ini terjadi, sudah barang tentu akan mengganggu pergerakan ekonomi Indonesia.

Untuk mengantisipasi agar

para investor tidak keluar dari negara ini, dibutuhkan cara agar mereka tetap berinvestasi di Tanah Air. Pemerintah saat ini yang diamanati konstitusi harus segera menyikapi keadaan ini.

Situasi politik yang menyebabkan investor akan menarik modalnya di Indonesia menjadi alasan mereka yang ditandai dengan tidak terciptanya situasi politik yang

stabil dan kondusif di negeri ini. Gaduhnya perilaku elite politik yang memanaskan iklim investasi juga menjadi pertimbangan mereka lari dari negeri ini.

Kondisi tersebut jelas merealisasikan dan membuat investor tidak nyaman. Oleh karena itu, mulai saat ini saya berharap elite berlaku sopan dan santun dalam berpolitik. Politik santun harus dikedepankan dan

terpatri dalam diri elite politik negeri ini.

Jika sudah begini, pemerintah harus segera mengantisipasi dan mengeluarkan kebijakan agar investor tidak keluar dari Indonesia. Kita akan sangat rugi jika ini tidak dicegah.

Erlangga Kusuma

Jl Daksinapati II No 22B
Kompleks Dosen UNJ
Rawamangun, Jakarta Timur

Penjelasan dari Bank CIMB Niaga

SEHUBUNGAN dengan surat Bapak Amir Sidharta yang berjudul 'Kecewa Pelayanan CIMB Niaga' (*Media Indonesia*, 9 November 2010), dengan ini kami sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialaminya atas layanan Bank CIMB Niaga.

Sebagai tindak lanjut dari keluhan tersebut, kami telah menghubungi Bapak Amir Sidharta guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Kami berterima kasih atas

kesempatan dan masukan yang telah diberikan. Apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut, Bapak Amir Sidharta dapat menghubungi kami. Karena kepuasan nasabah merupakan fokus dari seluruh usaha kami dalam upaya menjaga dan terus meningkatkan kualitas layanan Bank CIMB Niaga.

Dina Sutadi

Vice President Corporate
Communication Head
PT Bank CIMB Niaga

Jawaban BSM atas Keluhan Nasabah

Assalamualaikum Wr Wb. Berkaitan dengan pengaduan dari Ibu Rusida Surji pada Suara Anda di harian *Media Indonesia* 5 November 2010, dengan ini kami sampaikan bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) telah menyampaikan penjelasan kepada yang bersangkutan.

Ibu Rusida selaku pemilik rekening telah menerima penjelasan kami.

Dengan demikian, permasa-

lahan yang dialami Ibu Rusida dan Bank Syariah Mandiri sebagaimana disampaikan di harian *Media Indonesia* melalui rubrik Suara Anda telah selesai.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Wasalamualaikum Wr Wb.

Achmad Fauzi

Corporate Secretary
PT Bank Syariah Mandiri

Konspirasi Pelengseran Ketua RW

PADA 14 Maret 2010, Ketua RW 03 (saya) Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, terpilih secara demokrasi yang dihadiri Lurah Kebon Melati dan pihak Kecamatan Tanah Abang.

Namun, pengesahan dari pihak Kecamatan Tanah Abang atas usul dari Kelurahan Kebon Melati hingga saat ini belum saya terima sebagai Ketua RW

03, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang yang terpilih secara demokrasi.

Pada 9 Agustus, 24 Oktober, 25 Oktober, dan 29 Oktober 2010, ketua RW 03 mendapat undangan dari kelompok yang mengaku sebagai Forum Musyawarah (FM) yang pendirinya tanpa sepengetahuan ketua RW 03 untuk mengadakan musyawarah tanpa agenda yang jelas. Intinya, kelompok

yang mengaku FM menginginkan ketua RW 03 mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas.

Pada 31 Oktober 2010, kelompok yang mengaku sebagai FM mengadakan pemilihan ketua RW 03 tanpa dasar yang mengacu ke arah demokrasi terbuka (pemilih hanya perwakilan dari RT yang diundang).

Berangkat dari latar belakang

tersebut, apakah ada konspirasi pelengseran Ketua RW 03 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, yang terpilih secara demokrasi dari pihak Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Kebon Melati, Dekel RW 03 Kelurahan Kebon Melati dan kelompok yang mengaku sebagai FM?

Achmad Bastian

Jakarta

Hukum Mati para Koruptor

KORUPSI, suap, mafia hukum, mafia pajak, serta mafia-mafia lain senantiasa membuat runyam aturan hukum di negeri ini! Mengapa? Karena banyak oknum penegak hukum yang justru 'bermain' demi kepentingan mereka sendiri, sehingga mereka tidak pernah jera!

Oleh sebab itu, sudah sepatutnya hukuman mati diterapkan di negeri ini tanpa kecuali, agar wibawa hukum serta penegak hukum punya gereget yang maksimal. Mereka tidak mempermainkan hukum dengan alasan 'tuntutan kabur', 'melanggar HAM' dan lain sebagainya.

Kita sudah tahu bagaimana Edi Tanzil kabur, dan hingga kini tidak dapat ditangkap kembali. Terakhir Gayus dapat



PATA AREADI

keluar masuk Rutan Brimob Kelapa Dua, dengan memberi suap kepada oknum tertentu, dengan alasan banyak tahanan di Mako Brimob juga dapat keluar masuk. Inikah wajah rutan

kita? Inikah potret hukum di negeri ini?

Ada asap pasti ada apinya. Begitu pula dengan Gayus, terdakwa kasus mafia pajak yang bisa melanggang sampai ke

Bali, meski dia berstatus napi. Oleh sebab itu, sekali lagi, hukuman mati perlu diterapkan di negeri ini, agar wajah hukum kita tidak babak belur.

Kita kesampingkan saja bahwa hukuman mati itu melanggar HAM! Sebab bila itu masih jadi alasan, korupsi dan suap akan kian merajalela tanpa kendali.

Dengan demikian, para petinggi negeri ini harus berani menerapkan hukuman mati serta tindakan suap lain yang sejenisnya, sebab korupsi di negeri ini sudah sulit diberantas.

Pertanyaannya, mampukah hal tersebut diwujudkan?

Wisnu Widjaja

Jl Sindoro I No 16
Kalibuntu, Panggung
Tegal, Jawa Tengah

Menunggu Pemberian Tunjangan

BERITA terbaru di media massa menyebutkan bahwa pemberian tunjangan bagi prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan masih belum turun, karena masih menunggu peraturan menteri keuangan (permenkeu).

Hingga saat ini belum ada kejelasan kapan permenkeu akan dikeluarkan, guna memastikan kapan tunjangan perbatasan dapat diterima prajurit.

Padaحال sudah ada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tunjangan Perbatasan yang ditandatangani Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada 1 Januari 2010. "Semua sudah masuk bujet, nanti tunjangan tersebut akan dirapel dan diterima para prajurit sebagaimana mestinya," ujar Menhan.

Kita tidak tahu persis di mana kendala dan hambatan yang dihadapi Kementerian Keuangan, yang hingga kini belum bisa

mengeluarkan permenkeu guna mencairkan dana tunjangan perbatasan tersebut. Tapi yang pasti tunjangan tersebut sangat dinantikan oleh prajurit dan keluarga mereka. Apalagi biaya hidup di wilayah perbatasan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan di daerah lain, terlebih di perbatasan Papua.

Selain itu, tugas di pulau-pulau terluar dan kecil di wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan ketuhanan wilayah NKRI bukanlah ringan, melainkan sangat berat dan berisiko tinggi, nyawa dan harga diri bangsa sebagai taruhannya.

Pemberian tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan memang sudah selayaknya segera dilakukan, mengingat selama ini tingkat kesejahteraan prajurit TNI masih minim. Bila dibandingkan dengan tentara asing, boleh dikatakan tingkat kese-

jahteraan prajurit TNI jauh lebih rendah.

Disadari bahwa sebagai prajurit memang dituntut memiliki jiwa kejuangan dan pengabdian yang tinggi, tanpa pamrih, karena TNI bukanlah prajurit bayaran ataupun prajurit sewaan, yang bekerja dan mengabdikan demi mendapatkan upah. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata, bahwa prajurit TNI juga manusia biasa, yang punya keluarga, anak dan istri, yang juga mendambakan kesejahteraan dan kehidupan layak sebagaimana mestinya.

Boleh dikatakan institusi TNI merupakan salah satu institusi yang sangat memahami kondisi keuangan negara. Walaupun dengan anggaran terbatas, TNI tetap saja mampu menunjukkan kinerja, semangat kejuangan dan pengabdian yang tinggi.

Dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI secara tegas dinyatakan bahwa salah satu kriteria

tentara profesional adalah tentara yang dijamin kesejahteraannya. Setiap prajurit berhak mendapatkan penghasilan yang layak dan dibayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari APBN.

Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan prajurit TNI, dengan segera memberikan tunjangan khusus dan remunerasi, tidak hanya yang bertugas di wilayah perbatasan, tetapi juga seluruh prajurit TNI.

Perlu diingat bahwa prajurit TNI yang tidak dibangun kesejahteraannya melalui gaji dan tunjangan yang memadai tidak akan pernah menjadi prajurit yang profesional.

Indah Kusuma Dewi

Kedung Badak
Tanah Sereal
Bogor, Jawa Barat
indahkd@yahoooplaza.com

Kirimkan tanggapan dan komentar anda melalui:

SMS INTERAKTIF : Senin-Sabtu, 07.05 WIB di Metro TV | ONLINE: mediaindonesia.com

Kirimkan keluhan dan komentar anda tentang pelayanan publik ke email:

forum@mediaindonesia.com

Kirimkan komentar Anda atas tema: **Awas Pencurian Merajalela** (periode 15 November- 20 November 2010) ke:

opini publik di mediaindonesia.com